

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN
(Studi di Kecamatan Ciamis)**

LILIS ISTORIYAH

ABSTRAK

Jurnal ilmiah ini berjudul “ Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi Di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis)” Kecamatan Lumbung ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan, dengan komuditi unggulan perikanan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 400/Kpts.74-HUK/2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan yang terdiri dari 5 Kecamatan (Panumbangan, Cihaurbeti, Panjalu, Sukamantri dan Lumbung) mencakup 40 Desa. Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan ini belum berjalan dikarenakan terdapat beberapa masalah. Hal itu terlihat dari adanya gejala-gejala sebagai berikut, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat, Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pengembangan kawasan agropolitan di Kec. Lumbung, Masih adanya sikap pelaksana yang egosektoral.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan jurnal ilmiah ini adalah Kepala BAPPEDA kabupaten Ciamis, Kepala DPMPD Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Ciamis, Camat Lumbung, Kepala Desa di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan sebanyak 2 orang, Perwakilan kelompok perikanan sebanyak 4 orang. Dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung), diantaranya dengan mengajukan pengajaran maupun pelatihan terhadap Dinas- Dinas/ Instansi terkait untuk mengadakan pelatihan perikanan dengan narasumber ahli, meningkatkan kualitas masyarakat dari segi pendidikan, misalnya dengan menambah prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai dalam Kepmen PU No. 378/KPTS/1987 Tentang Standar Minimal Penyediaan Sarana Pendidikan dan untuk meminimalisir sikap egosektoral Bappeda mengupayakan adanya keterpaduan program, contohnya rapat koordinasi dan laporan triwulan yang dilakukan oleh Dinas- Dinas/ Instansi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, pengembangan kawasan agropolitan.

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Lumbung ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan, dengan komuditi unggulan perikanan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 400/Kpts.74-HUK/2010 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan yang terdiri dari 5 Kecamatan (Panumbangan, Cihaurbeti, Panjalu, Sukamantri dan Lumbung) mencakup 40 Desa. Implementasi kebijakan tentang pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Lumbung belum berjalan dikarenakan, terdapat beberapa masalah. Hal itu terlihat dari adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan masih

minimnya pembinaan teknis maupun pelatihan terhadap kelompok perikanan untuk memperkaya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk membudidayakan perikanan, Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada pengembangan kawasan agropolitan di Kec. Lumbung. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya prosentase masyarakat yang berpendidikan rendah diantaranya lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat, Masih adanya sikap pelaksana yang egosektoral, Hal tersebut mendorong minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan hasilnya dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah dengan menetapkan judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan**

(Studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis).”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) ?

B. LANDASAN TEORITIS

Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang- Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Edward III (Nugroho,2014:673) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila didukung 4 (empat) variabel pendukung, yaitu:

1. Variabel Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan / atau public dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. Variabel Sumberdaya, berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan public untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
3. Variabel disposisi, berkenaan dengan *kesediaan* dari para implementor untuk

carry out kebijakan public tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

4. Variabel struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* , karena ingin menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pengertian kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Adapun pengertian agropolitan berdasarkan Kabul Ali Mahi (20014,2) Secara harfiah “AGROPOLITAN” berasal dari dua kata yaitu (agro= pertanian), dan (politan/polis = kota), sehingga secara umum program agropolitan mengandung pengertian pengembangan suatu kawasan tertentu yang berbasis pada pertanian. Agropolitan (Agro = pertanian; Politan = kota) adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang, yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Sedangkan pengertian kawasan agropolitan berdasarkan paparan yang disampaikan BAPPEDA Kabupaten Ciamis, pada tanggal 17 Maret 2016 dalam rangka pembinaan pembangunan kawasan perdesaan disebutkan bahwa kawasan agribisnis terpilih yang terdiri dari kota pertanian dan daerah sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan batasan administrasi pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi. Dan berdasarkan paparan yang disampaikan BAPPEDA Kabupaten Ciamis, pada tanggal 17 Maret 2016 dalam rangka pembinaan pembangunan kawasan perdesaan disebutkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan sebagai alat guna mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu kawasan, sehingga sekitarnya dapat ikut berkembang, dengan

tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa-kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang Menurut Tan (Silalahi, 2009 : 28) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ialah :

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesis, hipotesis mungkin belum tergantung dari sedikit-banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan.

2. Waktu dan Tempat

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di Desa Lumbung dan Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan selama 11 bulan, yaitu dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Juli 2017.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam upaya penyusunan penelitian ini, terdapat 2 macam sumber, Yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta pihak-pihak lainnya yang terkait. Diantaranya yaitu, Kepala BAPPEDA kabupaten Ciamis, Kepala DPMPD Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Camat Lumbung Kabupaten Ciamis, Kepala Desa di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan sebanyak 2 orang, Perwakilan kelompok perikanan sebanyak 4 orang.

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, catatan kuliah, bahan-bahan dokumen berupa peraturan perundang-undangan ataupun bahan lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara.

5. Teknik Pengolahan/ Analisis Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan meliputi tiga tahap yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing/ verification.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Profil Desa Lumbung

Desa Lumbung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lumbung yang termasuk kedalam kawasan agropolitan dalam bidang perikanan. 5% dari wilayah Kecamatan Lumbung digunakan sebagai kawasan perikanan, dengan potensi unggulan yang dapat dikembangkan diantaranya gurame, nila, mas, dan udang galah. Dan produktivitas panen dalam setahun sebanyak 2 kali.

1.2 Profil Desa Rawa

Desa Rawa merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lumbung yang termasuk kedalam kawasan agropolitan dalam bidang perikanan, dengan luas wilayah 538 ha, dan luas perikanan 17 ha. Potensi unggulan yang dapat dikembangkan diantaranya gurame, nila, mas, dan udang galah. Dan produktivitas panen dalam setahun sebanyak 2 kali.

2. Pembahasan

2.1 Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (Studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis)

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai implementasi kebijakan tentang pengembangan

kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) dilihat dari faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yang menjadi dimensi- dimensi antara lain:

1. Variabel Komunikasi

Jika mengacu pada pendapat ahli Nugroho (2014:673), mengatakan bahwa komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau public dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Dalam dimensi ini penulis menjabarkan menjadi dua indikator sebagai berikut :

- a. Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan pengembangan kawasan agropolitan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagian besar informan mengemukakan pendapatnya bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan pengembangan kawasan agropolitan tidak berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari adanya keterlambatan waktu dalam melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan.

- b. Adanya sosialisasi yang maksimal dari Pemerintah Daerah sampai dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagian besar informan mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi dari pemerintah sampai dengan masyarakat belum berjalan, hal tersebut terlihat dari Masih minimnya pembinaan teknis maupun pelatihan terhadap kelompok perikanan Untuk memperkaya pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk membudidayakan perikanan.

2. Variabel Sumberdaya

Jika mengacu pada pendapat ahli Nugroho (2014:673), mengatakan bahwa komunikasi berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan public untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Dalam dimensi ini penulis menjabarkan menjadi tiga indikator sebagai berikut :

- a. Memiliki lahan yang didukung oleh SDA memadai dan telah memiliki

komuditi unggulan yang sesuai budaya lokal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagian besar informan mengemukakan pendapatnya bahwa Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki sudah memadai, tetapi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya masih rendah. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya penduduk bertamatan Sekolah Dasar (SD) kebawah menempati persentase lebih besar.

- b. Adanya sumber keuangan untuk pengembangan prasarana/sarana Agropolitan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagian besar informan mengemukakan pendapatnya bahwa dukungan sumber keuangan masih terbatas untuk pengembangan kawasan agropolitan.

- c. Adanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai baik dari pelaksana maupun masyarakat yang menunjang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa dari masyarakat prasarana dan sarana penunjang pendidikan kurang, sedangkan dari pelaksana kurangnya profesionalisme dalam mengembangkan kawasan agropolitan baik berupa pelatihan-pelatihan atau kegiatan lain untuk mengembangkan kawasan agropolitan, walaupun dari segi pendidikan untuk pelaksana dari dinas/ instansi sudah memadai.

3. Variable Disposisi

Jika mengacu pada pendapat ahli Nugroho (2014:673), mengatakan bahwa Variabel disposisi, berkenaan dengan *kesediaan* dari para implementor untuk *carry out* kebijakan public tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Dalam dimensi ini penulis menjabarkan kedalam dua indikator :

- a. Adanya kesadaran dan kesungguhan dari pelaksana untuk menerapkan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa *stakeholder* tidak siap

dengan penetapan kawasan agropolitan yang terlalu cepat, untuk meningkatkan wawasan dalam pengembangan kawasan agropolitan, seperti yang telah dilakukan yaitu melakukan studi banding ke Daerah Cianjur yang sudah hidup agropolitannya.

- b. Adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana dalam pengembangan kawasan agropolitan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa komitmen pelaksana, fokus dalam mengembangkan kawasan agropolitan. Sedangkan dari masyarakat menghasilkan perikanan yang berkualitas jumlah dan hasilnya, dengan merencanakan membentuk kelompok Usaha Bersama (KUB) sehingga dapat meningkatkan rengking pembangunan Kecamatan Lumbung.

4. Variable struktur birokrasi

Jika mengacu pada pendapat ahli Nugroho (2014:673), mengatakan bahwa variabel struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*, karena ingin menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Dalam dimensi ini penulis menjabarkan kedalam dua indikator :

- a. Adanya aktivitas organisasi yang fleksibel sehingga mampu membangun kerjasama lintas sektoral yang baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara adanya sikap egosektoral antar Dinas/ instansi terkait, karena setiap Dinas/Instansi terkait mempunyai kepentingan masing-masing dalam pengembangan kawasan agropolitan, misalnya Dinas Peternakan dan Perikanan telah maksimal dalam perikanan, tetapi tidak didukung oleh akses jalan oleh Dinas Cipta Karya .

- b. Adanya pola kemitraan antara Pemerintah- masyarakat-swasta

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagian besar informan mengatakan bahwa pola kemitraan antar Pemerintah- Masyarakat- Swasta belum berjalan, dikarenakan belum menjalankan fungsinya masing- masing, misalnya Pemerintah belum memfasilitasi sarana pemasaran, Masyarakat selaku unsur utama belum berupaya dalam mencari

langkah- langkah yang harus dilakukan, sedangkan belum bekerjasama dengan pihak Swasta karena karena masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan perikanan pihak swasta.

2.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (Studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis).

Untuk dapat menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis), penulis mengacu kedalam empat dimensi dalam implementasi kebijakan. Dimana terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik sehingga menemukan hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Adanya keterlambatan waktu dalam melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga koordinasi tidak berjalan dengan baik.
2. Masih minimnya pembinaan teknis maupun pelatihan terhadap kelompok perikanan Untuk memperkaya pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk membudidayakan perikanan.
3. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola SDA
4. Terbatasnya anggaran penunjang prasarana dan sarana agropolitan
5. Kurangnya prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).
6. Ketidaksiapan stakeholder dalam pengembangan kawasan agropolitan
7. Masyarakat belum mampu meningkatkan jumlah dan kualitas hasil perikanan.
8. Adanya sikap egosektoral antar Dinas/ SKPD terkait.
9. Belum menjalankan fungsinya masing-masing.

2.3 Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis).

Untuk dapat menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis). Penulis mengacu kedalam empat dimensi dalam implementasi kebijakan, sehingga upaya yang dilakukan berdasarkan hambatan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang intens baik melalui alat komunikasi, maupun dengan surat pemberitahuan agar pelaporan kegiatan triwulan dapat segera disampaikan kepada BAPPEDA.
2. Pengajuan dari masyarakat untuk mengadakan pelatihan atau pembinaan teknis perikanan kepada Dinas-dinas/ SKPD terkait dengan narasumber ahli
3. Penambahan tenaga guru , penambahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, serta pelatihan bagi masyarakat untuk dapat mengelola SDA yang dimiliki dengan didukung oleh peningkatan kesehatan masyarakat
4. Menggunakan Anggaran Dana Desa/ ADD dan kreativitas masyarakat untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan
5. Menambah prasarana dan sarana pendidikan yang sesuai dalam Kepmen PU No. 378/KPTS/1987 tentang Standar minimal penyediaan sarana pendidikan
6. Meningkatkan wawasan dengan mengadakan studi banding ke Daerah lain yang sudah bagus agropolitannya, seperti telah mengadakan studi banding ke Daerah Cianjur.
7. Merencanakan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha bersama (KUB) untuk meningkatkan jumlah dan kualitas perikanan
8. Mengupayakan adanya keterpaduan program misalnya rapat koordinasi dan laporan triwulan yang dilakukan

oleh Dinas/ instansi terkait sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri

9. Melakukan monitoring evaluasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pelaksana dari instansi terkait

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diantaranya terlihat dari Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ini menangani kawasan agropolitan di Kecamatan Lumbung belum terbentuk sehingga menghambat kerjasama lintas sektoral, kemudian belum adanya tindakan (action plan) baik dari pemerintah ataupun masyarakat, ketidaksiapan *stakeholder* dalam pengembangan kawasan agropolitan yang terlalu cepat, serta banyaknya pihak-pihak yang terlibat menyebabkan sikap egosektoral.
2. Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan kawasan agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) berdasarkan hasil penelitian diantaranya adalah kurangnya komunikasi sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya kawasan agropolitan, selain itu ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendahnya. Dan dari pelaksana kurangnya profesionalisme, selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan, kesediaan dari pelaksana masih kurang hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya sikap egosektoral, sedangkan komitmen dari pelaksana adalah memaksimalkan pembangunan kawasan agropolitan tetapi kenyataan

dilapangan Pemerintah- Masyarakat- Swasta masing berjalan sendiri-sendiri, sehingga menjadikan proses implementasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan jauh dari efektif.

3. Upaya- upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) antara lain : Melakukan komunikasi yang intens baik melalui alat komunikasi, maupun dengan surat pemberitahuan agar pelaporan kegiatan triwulan dapat segera disampaikan kepada BAPPEDA, selain itu ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM), dengan penambahan tenaga guru, penambahan dan peningkatan fasilitas pendidikan , serta didukung oleh kesehatan masyarakat. Selain itu juga diupayakan untuk meningkatkan wawasan dengan mengadakan studi banding ke Daerah Cianjur yang sudah hidup agropolitannya, dan memaksimalkan pengembangan kawasan agropolitan dengan mengupayakan adanya keterpaduan program misalnya rapat koordinasi, melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, seta melakukan monitoring evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Dinas/instansi/pihak-pihak terkait seyogyanya melakukan koordinasi dan sosialisasi secara intens tentang pengembangan kawasan agropolitan kepada masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat untuk membudidayakan perikanan.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis), baiknya hal yang menjadi perhatian utama adalah unsur masyarakat terutama kelompok perikanan karena merupakan unsur utama

atau unsur penggerak yang berprakarsa secara mandiri dan kreatif untuk mencari langkah-langkah yang harus dilakukan, supaya selain usaha budidaya perikanan yang telah turun temurun bisa dilakukan, dapat juga menciptakan dan menumbuh-kembangkan usaha-usaha baru off-farm, seperti penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil perikanan, pemasaran (marketing), atau penyedia jasa keuangan.

3. Agar upaya- upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan- hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan (studi di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis), dapat berjalan secara maksimal, perlu segera dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) agar segera dapat disusun rencana pembangunan kawasan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV . Alfabeta
- Mahi, Ali Kabul. 2014. *Agropolitan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nugroho, Riant. 2014 . *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Gramedia
- Silalahi, Uber . 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Keputusan Bupati Ciamis Nomor 400/kpts.74-HUK/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan
- Paparan yang disampaikan BAPPEDA Kabupaten Ciamis, pada tanggal 17 Maret 2016 dalam rangka Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

IDENTITAS PENULIS

LILIS ISTORIYAH, Lahir di Ciamis, 28 Mei 1994. Adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unigal Ciamis. Tinggal di Dusun Limus Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.